

Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Adib, Idris, Mike Triani

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang
Telp. 445089 Fax. (0751) 447366, e-mail. info@fe.unp.ac.id,
tanjungadib@gmail.com

Abstract: *This study aims to know and analyze the influence of Democracy, Gini and Province Minimum Wages to Economic Growth in Indonesia. The data used are panel data from 33 Provinces in Indonesia during the period 2010-2016. The type of research used is descriptive and associative. The type of data used is secondary data. This research uses Random Effect Model (REM) approach.*

The results of this study indicate that: (1) Indonesian Democracy Index has no significant effect on Economic Growth in Indonesia, (2) Gini index has negative and significant impact on Economic Growth in Indonesia; (3) Province Minimum Wage has positive and significant impact on Economic Growth in Indonesia., (4) Indonesia Democracy Index, Gini Index, Province Minimum Wage have a significant effect on Economic Growth in Indonesia. Suggested to the government should pay more attention to the condition of Democracy, Gini Index and Provincial Minimum Wage, because then it can give influence to economic growth in Indonesia.

Keywords: *Economic Growth (PDRB ADHK), Indonesia Democracy Index, Gini Index, Province Minimum Wage.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh hubungan Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2010-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM).*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (2) Indeks gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (3) Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia., (4) Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Disarankan kepada pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kondisi Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi, karena dengan begitu dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: *Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK), Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi.*

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami proses peningkatan dan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produktivitas negara tersebut. Produktivitas negara merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seluruh penduduk negara itu secara agregat.

Dalam sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki karakteristik institusional yang baik, yang diukur menggunakan variabel, seperti; kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah efisiensi peradilan, pemerintahan yang efektif dan perlindungan terhadap properti. Lebih jauh lagi, kebebasan ekonomi akan memberikan institusi yang baik bagi suatu negara. Sehingga, dengan kualitas intitusi yang baik dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu bentuk institusi adalah institusi politik. Mankiw (2000) dan Blanchard (2006) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Institusi akan berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Berbagai indikator juga muncul untuk mengukur bagaimana faktor politik memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Indikator-indikator tersebut antara lain; *property rights*, *pressure of redistribution*, dan *predatory dictator* (Drazen, 2000).

Tabel 1.1
Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2015 Versi *The Economist*

Tahun	Rangking	Total Skor	Skor Kategori					Status
			Proses Pemilu Dan pluralisme	Fungsi pemerintahan	Patisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan sipil	
2015	49	7.03	7.75	7.14	6.67	6.25	7.35	Flawed Democracies
2014	49	6.95	7.33	7.14	6.67	6.25	7.35	Flawed Democracies
2013	54	6.82	6.92	7.50	6.67	6.25	6.76	Flawed Democracies
2012	53	6.76	6.92	7.50	6.11	5.63	7.65	Flawed Democracies
2011	60	6.53	6.92	7.50	5.56	5.63	7.06	Flawed Democracies
2010	60	6.53	6.92	7.00	5.00	5.63	7.06	Flawed Democracies
2008	69	6.34	6.92	6.76	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies
2007	65	6.41	6.92	7.14	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies

Sumber: Statistik Politik 2016

Dari tabel peringkat demokrasi versi the economist di atas dapat kita lihat perkembangan demokrasi Indonesia, hal itu dapat kita lihat dari terus meningkatnya ranking demokarsi Indonesia. Dari kategori penilaian demokrasi

proses pemilu dan pluralisme, partisipasi politik dan kebebasan sipil terus mengalami peningkatan hal ini terjadi karena makin tingginya kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat, para pelaku usaha, aktifis LSM, media untuk turut serta dalam pembangunan.

Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat juga ikut membeikan pengaruh pada partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan politik, baik dalam pemilu maupun hal-hal politik lainnya, meningkatnya parisipasi masyarakat dalam politik ini juga didukung semakin tingginya kebebasan bagi masyarakat untuk memilih dan dipilih, berkumpul dan berserikat. Hal ini menjadikan Indonesia mulai dipandang sebagai negara yg demokratis. Namun dari aspek budaya politik belum mengalami perkembangan. Fakta ini dapat kita lihat di dalam masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaul di satu pihak dan partisipan di pihak lainnya. Hal lain yang mengganggu budaya politik adalah ikatan primordialisme yang masi kuat, politik balas jasa dan krisis keteladanan di tengah masyarakat.

Sejak tahun 2009 Indonesia menyusun pengukuran demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan Bappenas. Sedabgkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitaif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif didapat melalui koding koran dan dokumen, sedangkan motede kualitatif melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap narusumber. Indeks ini terdiri dari beberapa aspek pertama aspek kebebasan sipil, kedua aspek hak-hak politik dan yang terakhir aspek lembaga demokrasi.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Temuan secara empiris dari beberapa peneliti menunjukkan berbagai hasil yang kontroversi terkait masalah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, ketimpangan distribusi pendapatan dianggap dapat menimbulkan ketegangan sosial dan situasi yang tidak kondusif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

TINJAUAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menggambarkan sampai dimana perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi dalam Case and Fair (2004:323) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keluaran total suatu perekonomian.

Menurut Dornbusch (2008: 11) Tingkat pertumbuhan dari perekonomian adalah tingkat dimana produk domestik bruto (PDB) meningkat. Secara rata-rata, kebanyakan perekonomian tumbuh beberapa poin persentase per tahun selama beberapa periode yang panjang. Adapun penyebab pertumbuhan PDB adalah tersedianya jumlah sumber daya sejalan perubahan perekonomian yaitu berupa modal dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksi, sehingga kenaikan faktor produksi diperhitungkan menjadi kenaikan dalam PDB.

Dampak demokrasi pada pertumbuhan ekonomi

Demokrasi memiliki efek menguntungkan baik politik dan ekonomi. lembaga-lembaga demokrasi memiliki peran untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan membatasi perilaku pemerintah atau dimaksudkan untuk memperkenalkan kebijakan tidak populer. Diantara manfaat demokrasi adalah bahwa hal itu memungkinkan pengusiran pemimpin yang buruk.

Hasil penelitian empiris tentang demokrasi terbagi menjadi tiga. Sekitar sepertiga penelitian menemukan dampak positif demokrasi terhadap pertumbuhan, sepertiga yang lainnya menemukan bahwa demokrasi tidak berdampak apa-apa, dan sepertiga sisanya menemukan bahwa demokrasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Baru-baru ini Ahmed Mobarak berpendapat bahwa rezim demokratik akan lebih stabil daripada rezim autokrasi. Hasilnya, karena perekonomian yang lebih tidak stabil diketahui tumbuh lebih lambat daripada perekonomian yang stabil, efek positif demokrasi pada pertumbuhan dapat terlaksana melalui saluran ini. Namun, manfaat yang diperoleh dapat dinegosiasikan oleh efek negatif demokrasi pada pertumbuhan (Todaro: 2006).

Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan penghasilan dikatakan timpang apabila individu yang kaya dapat dapat mendikte seluruh pola produksi, karena permintaannya lebih banyak membawa bobot dalam pasar barang-barang konsumsi dibandingkan orang-orang yang miskin (Todaro,2004:225).

Deliarnov (2006: 77) pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkapka sekaligus mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang diakibatkan pemusatan penguasaan dan kepemilikan aset ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menjelajahi komposisi dan interrelationship di antara aktor-aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi demi mewujudkan keadilan dan kesempatan sosial-ekonomi.

Lahouij (2017) negara-negara yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan paling tinggi kebanyakan adalah negara-negara berkembang dan terbelakang. Selain itu, telah diperdebatkan bahwa kesetaraan pendapatan di negara berkembang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan

Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja baik berupa uang maupun berupa barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa dan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dalam berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, Sadono Sukini (2002).

Sudarsono menyatakan bahwa permintaan akan tenaga kerja di pengaruhi oleh tingkat upah dan faktor lain yaitu permintaan akan barang-barang hasil produksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat upah pada tenaga kerja maka akan memicu meningkatnya konsumsi pada masyarakat sehingga hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. (Julianto 2016)

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Alesina & rodrik (1994) dalam penelitiannya yang berjudul "*Distributive Politics and Economic Growth*" dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa tidak meratanya pendapatan dan tidak meratanya kepemilikan lahan akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, sedangkan demokrasi, indeks gini ketimpangan pendapatan dan indeks gini ketimpangan kepemilikan lahan sebagai variabel bebas.

Charysa (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 dalam penelitiannya Upah minimum regional merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang baik terdapat jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan cukup banyak. Penetapan upah yang tinggi menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada di pasaran, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi.

Zaouali (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Corruption's and Democracy's effects on Economic Growth*" Memanfaatkan pendekatan data panel dinamis untuk lebih dari 40 negara selama periode 2000- 2011, hasil menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi, korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara negara-negara non-demokratis menderita efek negatif dari korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat sedangkan demokrasi dan korupsi sebagai variabel bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menerangkan yang diteliti apa adanya dan data yang digunakan berbentuk angka-angka. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisa hubungan yang erat tentang pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Data penelitian ini diambil berdasarkan data panel tahunan di 33 Propinsi Indonesia, data penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang menunjukkan perkembangan data Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi dari tahun 2012-2016.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t}^2 + \beta_4 X_{4t} + U_t \quad (1)$$

Dimana :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X1 = Indeks Demokrasi Indonesia
- X2 = Indeks Gini
- X3 = Upah Minimum Provinsi
- U = Kesalahan pengganggu (*Disturbance term*)
- e = Logaritma natural

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis dan teori yang telah diajukan peneliti sebelumnya, dimana peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia pada suatu daerah tertentu, diduga ikut mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi berjalan paralel dengan kemapanan sistem demokrasi negara bersangkutan. Namun, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem politik demokrasi justru melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari satu dasawarsa ternyata belum membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi.

Sistem politik Indonesia telah merujuk sistem demokrasi yang modern. Dimana semua sistem kelembagaan politik yang merupakan pilar penting dalam demokrasi telah terbangun dengan baik di Indonesia, bahkan presiden dan anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat. Namun, Sistem demokrasi di Indonesia tak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi karena terhalang oleh praktik korupsi berjenjang dan berkelanjutan sehingga tak mampu menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas ekonomi baik aktivitas bisnis, investasi, maupun

pertukaran barang maupun jasa dan lalu lintas modal domestik maupun asing (Alhumami).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan anantara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi tidak kuat. Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena demokrasi di Indonesia tidak didukung oleh institusi yang baik dan lembaga parlemen yang bebas dari korupsi sehingga hal ini tak mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas perekonomian.

Pengaruh Indeks Gini Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Keadaan ini terjadi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi sebagai modal pembangunan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Redistribusi pendapatan dari orang-orang kaya untuk orang miskin mengurangi tingkat tabungan ekonomi secara keseluruhan dan dengan demikian dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Alasan lain adalah bahwa redistribusi pendapatan bisa menurunkan insentif bagi orang kaya untuk bekerja keras, dan yang juga dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, bahwa kesetaraan pendapatan membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, dan ketimpangan pendapatan membuatnya lebih tinggi.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks gini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini juga sejalan dengan teori kutznet (kurva U terbalik) dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Ketimpangan di Indonesia masih berada di level menengah dimana rata-rata ketimpangan di Provinsi-provinsi di Indonesia sebesar ≥ 3 . Sehingga hal ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Dalam meningkatkan penetapan upah minimum regional langkah konkret kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, dengan memperluas lapangan pekerjaan maka pengangguran berkurang dan pendapatan (upah) masyarakat meningkat. Selain itu, dalam menetapkan upah minimum pemerintah harus memperhatikan tingkat inflasi, karena kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah nominal.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Upah Minimum Provinsi secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena apabila

pemerintah melakukan pengkajian upah minimum dengan baik maka roda perekonomian di daerah tidak akan terganggu. Sehingga Upah Minimum Provinsi bisa menciptakan kestabilan perekonomian, karena upah minimum dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 5 tahun peride penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti Indeks Demokrasi Indonesia tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Indeks Gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti semakin rendah Indeks Gini maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi Upah Minimum Provinsi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak lagi terjadi penyelewengan kekuasaan terutama terkait penyelewengan terhadap anggaran baik dalam pembahasan maupun terhadap pelaksanaannya.
2. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas lapangan kerja, penyediaan infrastruktur ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan investasi.
3. Dewan Pengupahan Provinsi dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku yang berwewenang dalam penetapan upah minimum agar lebih bijak dalam menetapkan tingkat upah minimum dengan melihat tingkat kebutuhan hidup layak (KHL), pendapatan perkapita daerah, kondisi pasar kerja, serta produktivitas tenaga kerja.
4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

Alesina, D.Rodrik. 1994. *Distributive Politics and Economic Growth*. *Digital*

Access to Scholarship at Harvard.

- Caporaso, James A, David P.Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Edisi 1, Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Case, Karl E dan Ray C.Fair. 2004. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro, PT.INDEKS: Jakarta.
- Charysa, Ninda Noviani. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah 2008-2011. *Economics Development Analysys Journal*.
- Deliarinov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dornbush, Fischer. 2008. Makroekonomi. Edisi kesepuluh. PT. Media Global Edukasi.
- Jhingan,M.L.2012. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Edisi 1, Pt.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Lahouij, Hamid. 2017. *The Effects of Income inequality on Economic Growth Evidence from MENA Countries. Eastern Illinois University The Keep*
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadalcalar, Prof. Dr. Ali Riza. 2013. *Democracy and growth: Evidence from Transition Economies. American International Journal of Contemporary Research*.
- Statistik Politik 2016.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta :kencana prenadamedia Group.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS* Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012: 195-211.
- Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2004,2006. *Pembangunan Ekonomi* edisi kedelapan Jakarta: Erlangga.